

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi; Dalam Hubungan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Semy Pesireron^{1*}, Mis Fertyno Situmeang²

^{1,2} Politeknik Negeri Ambon

Semy.peron@gmail.com

Abstract: As a moderating variable, the research objective is to empirically test the influence on the quality of financial reports and the influence of the government's internal control system. The type of research is the causal relationship with sampling technique, by using purposive sampling. The survey sampling method is used in data collection and data analysis technique through Moderate Regression Analysis (MRA) with a significant degree 0.05. The result of the research is to prove the role of the government's internal auditor does not significantly affect the quality of the Maluku Provincial Government's financial statement. Furthermore, the government's internal system has a significant effect on the relationship between the role of the government's internal auditor, but it has no significant effect on the quality of the Maluku Provincial Government's financial report.

Keywords: Government Internal Auditor, Quality of Financial Report, Government Internal Control System.

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderate Regression Analysis (MRA) dengan tingkat kepercayaan 0,05. Hasil pengujian menunjukkan peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap hubungan peran auditor internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.

Keywords: Auditor Internal, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pendahuluan

Kurangnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah saat ini tidak terlepas dari faktor peran auditor internal serta implementasi sistem pengendalian intern. Banyak kendala dan permasalahan yang berdampak pada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada sekarang ini dalam proses penyusunan laporan keuangan. Permasalahan yang masih ditemui adalah; prosedur pelaksanaan penyusunan yang belum sesuai SOP, masih kurangnya koordinasi dan konsultasi antara SKPD dengan mitra atau pendampinya pada Bidang Akuntansi di BPKAD Provinsi Maluku. Hal ini yang mengakibatkan masih sering terjadi kesalahan-kesalahan proses transaksi yang dilakukan oleh SKPD yang akan berpengaruh pada laporan konsolidasi keuangan Pemda (BPKAD Provinsi Maluku).

Pemerintah Provinsi Maluku pada dasarnya mengalami peningkatan opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.

Opini tersebut naik dari tahun sebelumnya, yakni tahun anggaran 2018 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini dimaksud diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku sampai tahun 2021. Selanjutnya, LKPD Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Namun, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai, Realisasi Belanja Modal pada Beberapa SKPD tidak sesuai kontrak; dan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai; serta Belanja atas Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, (<https://maluku.bpk.go.id/>).

BPK juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023. Meskipun opini yang diberikan adalah WTP, BPK juga menemukan beberapa permasalahan antara lain; kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2023 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, diantaranya adalah Pengelolaan Keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai, realisasi belanja perjalanan dinas pada sepuluh OPD tidak sesuai ketentuan, dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 15 (lima belas) paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan, (<https://maluku.bpk.go.id/>).

Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa terhindar ketika fungsi pengawasan internal oleh auditor mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Auditor internal pemerintah yang memiliki peran dan fungsi pemeriksaan dan pengawasan seharusnya meningkatkan kualitas pemeriksaannya sehingga mampu mendeteksi hal-hal dimaksud sejak dini sebelum ditemukan oleh BPK RI. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2024) menemukan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan fenomena dimana pemerintah daerah kadang menghasilkan audit internal dengan rekomendasi untuk perbaikan, tetapi respon yang lambat dan kurang tepat dari pihak yang diaudit membuat pemeriksaan auditor internal menjadi kurang berarti.

Pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPIP yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan BPK RI bahwa, sistem

pengendalian intern yang efektif dapat memediasi ataupun memperkuat dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah (BPK, 2023).

Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2024). Penelitian yang dilakukan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen menunjukkan hasil variabel peran auditor internal secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang adalah penulis memasukkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi dalam melihat pengaruhnya terhadap hubungan antara peran auditor internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Penambahan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dengan pertimbangan atas beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Maluku masih ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal. Apabila sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, akan meningkatkan peran auditor internal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil telaah kajian empiris diatas mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana penelitian sebelumnya menemukan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, kajian ini menawarkan kebaruan dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebagai moderasi untuk mengeksplorasi bagaimana sistem pengendalian internal yang efektif dapat memperkuat peran auditor internal, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, serta menilai peran sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua pertanyaan utama: apakah peran auditor internal mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dan apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara peran auditor internal dengan kualitas penyajian laporan keuangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, serta peran sistem pengendalian internal pemerintah dalam memoderasi hubungan tersebut.



Kajian Teori

Teori Keagenan

Abdul dalam penelitian Ternalemta et al., (2021) menjelaskan prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. Agen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder yang membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pihak manajemen pemerintah daerah yang cenderung menginginkan keuntungan pribadi mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Karenanya, perlu untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut seperti peran auditor internal dan sistem pengendalian intern pemerintah. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang bertindak sebagai principal.

Faktor-faktor tersebut seperti peran auditor internal dan sistem pengendalian intern pemerintah. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang bertindak sebagai principal. Salah satu bentuk informasi yang menunjukkan kinerja agen ditunjukkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode. Untuk memenuhi hal dimaksud, agen yang dalam hal ini pemerintah seharusnya memberdayakan aparturnya dalam hal; pemahaman yang baik tentang berbagai ketentuan yang terkandung dalam Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, karena laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah merujuk dari aturan dimaksud.

Hal lain adalah auditor intern sebagai aparatur pemerintah ditingkatkan lagi kualitasnya, sehingga dalam melakukan reuiu terhadap pelaporan keuangan dapat menemukan berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Selanjutnya, penerapan

sistem pengendalian intern yang baik, sehingga mampu menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal serta mematuhi dengan baik segala peraturan yang berlaku.

Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Internal auditor merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan instansi secara efektif dan efisien. Dengan semakin baiknya proses kegiatan pengawasan atau rewiuw yang dilakukan oleh peran auditor internal (APIP) ke instansi-instansi pemerintah tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemda.

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh (Kusumawati, 2016) hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG. Sedangkan penelitian tentang pengaruh peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan belum banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Adha Inapty & Martiningsih, (2016) menunjukkan peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁: Peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi Hubungan Peran Auditor Internal Dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya.

Pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan mengoptimalkan SPI diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah (BPK, 2021). Sistem pengendalian intern yang baik diterapkan oleh aparatur



akan berdampak bagi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti secara langsung mencari data yang diperlukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang menjadi sampel. Disamping itu, tipe penelitian ini adalah penelitian dasar karena penelitian ini menguji teori yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan suatu pengetahuan tentang bagaimana memecahkan masalah yang dapat terjadi dalam organisasi. Selanjutnya, jenis penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (*causal research*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Menurut Sugiyono, (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Maluku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.1 Populasi Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Dinas	23
2.	Badan	8
3.	Setda/Biro	9
4.	Setwan	6
Total		46

Sumber; Portal resmi Provinsi Maluku, (2024)

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2019). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Kepala Sub Bagian Keuangan di masing-masing OPD, pengelola laporan keuangan masing-masing OPD (bendahara dan operator SIMDA keuangan dan memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Pengujian kualitas data dilakukan melalui validitas data dan reliabilitas. Sedangkan pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat normalitas, bebas multikolonieritas dan bebas heteroskedastisitas. Selanjutnya alat analisis yang digunakan adalah pengujian *Moderate Regression Analysis (MRA)*.

Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel

Variabel Penelitian		N	Rentang Teoritis	Rentang Aktual	Rata-rata Teoritis	Rata-rata Aktual	Std Dev.
Kualitas Laporan Pemerintah	Penyajian Keuangan	168	5 s/d 25	15 s/d 25	15	19,27	2,891
Peran Auditor Internal		168	7 s/d 35	21 s/d 35	21	27,82	4,168
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		168	9 s/d 45	24 s/d 45	27	34,76	5,795

Sumber; Hasil pengolahan data primer, (2024)

Data-data dalam tabel statistik deskriptif di atas diuraikan sebagai berikut:

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen yang terdiri atas 5 pernyataan kuesioner dan berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik menghasilkan rentang aktual antara 15 sampai 25. Hal ini berarti, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang berkualitas berada pada kisaran 15 dan yang lebih berkualitas berada pada kisaran 25. Rentang teoritis variabel yang dihitung berdasarkan jumlah indikator (5 pernyataan) dengan skala pengukuran 1 - 5) menghasilkan rentang teoritis antara 5 menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang berkualitas sampai 25 menunjukkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 19,27 lebih besar dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 15, sehingga disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah cenderung berkualitas. Disamping itu, nilai standar deviasi variabel sebesar 2,891 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel, sehingga disimpulkan bahwa data variabel kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dikategorikan baik.

Peran Audit Internal (X)

Variabel peran audit internal diukur dengan instrumen yang terdiri atas 7 pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik menghasilkan rentang aktual antara 21 sampai 35. Hal ini berarti, kurangnya peran audit internal berada pada kisaran 21 dan yang lebih pada kisaran 35. Rentang teoritis variabel yang dihitung berdasarkan jumlah indikator (7 pernyataan) dengan skala pengukuran 1 - 5) menghasilkan rentang teoritis antara 7 menunjukkan kurangnya peran audit internal sampai 15 menunjukkan peran yang lebih tinggi. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 27,82 lebih kecil dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 21 sehingga disimpulkan bahwa peran audit internal cenderung



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

baik. Nilai standar deviasi variabel sebesar 4,168 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel, sehingga disimpulkan bahwa data variabel peran audit internal dikategorikan baik.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan instrumen yang terdiri atas 9 pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik menghasilkan rentang aktual antara 24 sampai 45. Hal ini berarti, sistem pengendalian internal yang kurang berada pada kisaran 24 dan yang lebih baik pada kisaran 45. Rentang teoritis variabel yang dihitung berdasarkan jumlah indikator (9 pernyataan) dengan skala pengukuran (1 - 5) menghasilkan rentang teoritis antara 9 menunjukkan kurangnya sistem pengendalian internal sampai 45 menunjukkan sistem pengendalian internal yang tinggi. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 34,76 lebih kecil dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 27 sehingga disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern cenderung dilakukan dengan baik. Nilai standar deviasi variabel sebesar 5,795 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel, sehingga disimpulkan bahwa data variabel sistem pengendalian internal dikategorikan baik.

Hasil Pengujian Validitas dan Relibilitas

Tabel 3. Pengujian Validitas Data

Variabel	Jumlah Indikator	Nilai <i>Person Corelation</i>	<i>Sig.</i>
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	5	0,91 s/d 0,94	0,00
Peran Auditor Internal	7	0,79 s/d 0,88	0,00
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	9	0,75 s/d 0,88	0,00

Sumber; data primer diolah, (2024)

Nilai pada tabel di atas menunjukkan hasil *person corelation* variabel $> 0,30$ serta tingkat signifikan $< 0,01$. Disimpulkan, data penelitian valid (Ghozali, 2018).

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	0,96
Peran Auditor Internal	0,92
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,93

Sumber; data primer diolah, (2024)

Tabel di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* variabel penelitian lebih besar dari batas minimal 0,60. Disimpulkan, indikator-indikator variabel penelitian dikategorikan reliabel atau handal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas Data

Tabel 5. Pengujian Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
Nilai <i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,36
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,99

Sumber; data primer diolah, (2024)

Data di atas menunjukkan nilai *kormogolov smirnov* adalah 0,39 serta tingkat signifikan adalah 0,99 yang lebih besar dari 0,05. Disimpulkan, data terdistribusi secara normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas

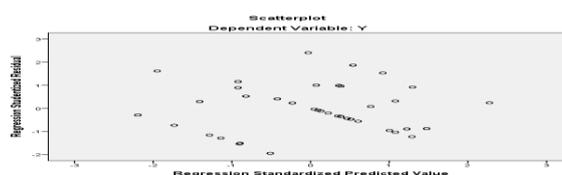
Variabel Independen	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF
Peran Auditor Internal	0,80	1,34
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,70	1,41

Sumber; data primer diolah, (2024)

Data di atas memperlihatkan nilai *tolerance* variabel independent $< 0,1$. Artinya, bebas korelasi antar variabel independen. Selanjutnya nilai *variance inflantion factor* (VIF) variabel independen > 10 . Disimpulkan, bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber; data primer diolah, (2024)

Hasil pengujian heteroskedastisitas di atas menunjukkan pola yang jelas, dengan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Disimpulkan, tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel 7. Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA)

Keterangan	Koefisien	t-statistik	P-value
F Model	23,81	-	-
<i>Sig</i>	0,00	-	-
R^2	0,63	-	-
<i>R Square</i>	0,40	-	-
<i>Adjusted R Square</i>	0,38	-	-
(Constant)	1,60	0,59	0,55
Peran Auditor Internal	0,03	0,51	0,61
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,28	4,84	0,00
Interaksi	0,01	6,57	0,00

Sumber; data primer diolah, (2024)



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Hasil uji f-statistik menunjukkan nilai f- hitung sebesar 23,81 dengan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Disimpulkan, model regresi layak digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *adjusted R²* pada nilai 0,38 atau 38%. Artinya, variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 38%., sedangkan 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan. Pengujian hipotesis pertama menyimpulkan variabel peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,03 dan nilai probabilitas sebesar 0,61 di atas derajat signifikan 0,05. Pengujian selanjutnya menyimpulkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,28 dan nilai probabilitas sebesar 0,00 di bawah derajat signifikan 0,05. Pengujian hipotesis kedua menyimpulkan, sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi secara signifikan pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien variabel interaksi sebesar 0,01 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 di bawah tingkat signifikan 0,05.

Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

Di OPD Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengawasan atau revidi pelaporan keuangan tidak terlepas dari tanggung jawab auditor internal pemerintah daerah yaitu inspektorat. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik dimana nilai rata-rata aktual sebesar 27,02 jika dibandingkan dengan indikator variabel maka responden rata-rata menyatakan netral terhadap pernyataan indikator dimaksud. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur di OPD cenderung merasakan bahwa auditor Internal belum memberikan nilai tambah bagi pekerjaan aparatur keuangan seperti; laporan auditor internal dikeluarkan dalam waktu yang tidak tepat, laporan auditor internal kadang tidak jelas dan logis, ataupun auditor internal dalam melaksanakan fungsinya dirasakan masih dipengaruhi oleh pihak lain, dimana ada beberapa temuan di OPD yang sulit diungkapkan karena adanya hubungan auditor dengan pihak-pihak di OPD tersebut seperti hubungan kekerabatan, kekeluargaan maupun kepentingan lainnya. Hal ini mengakibatkan responden merasakan auditor internal belum maksimal dalam memberikan inspeksi dan pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingannya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik. Selain itu, *principal* mengharapkan informasi yang disajikan oleh *agent* dalam pelaporan keuangan haruslah sesuai dengan kenyataannya. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh *agent*, baik itu keterandalan maupun ketepatan waktu pelaporan sangat tergantung pada peranan aparatur internal dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ketika *agent* tidak dapat memaksimalkan aparatur dimaksud, maka

keinginan principal untuk mendapatkan laporan yang akurat dan berkualitas tidak akan tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adha Inapty & Martiningsih, (2016) pada pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa peran auditor internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Disisi lain, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, (2016) dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan peran audit internal terhadap mekanisme GCG yang diukur dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Hubungan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua melalui uji *Moderate Regression Analysis* memberi bukti variabel sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila SPIP diterapkan dalam proses pelaporan keuangan dengan baik, maka akan lebih mudah auditor internal dalam melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Pengendalian intern dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Oleh karena itu, pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva serta dipercayainya catatan keuangan. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apakah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal di antaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan yang akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan nilai pelaporan keuangan yang andal.

Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa rata-rata aktual sebesar 34,50 yang lebih besar dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 27. Hasil ini mengindikasikan bahwa system pengendalian di OPD Pemerintah Provinsi Maluku cenderung diterapkan dengan baik. Selanjutnya jika rata-rata aktual variabel tersebut diukur dengan indikator variabel, maka responden cenderung menyatakan setuju atas setiap indikator dimaksud. Artinya bahwa di OPD Pemerintah Provinsi Maluku sub bagian akuntansi atau keuangan telah menyelenggarakan system akuntansi yang meliputi; prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain



kas, daftar rekening (*chart of account*) pemerintah daerah tersedia dan digunakan, transaksi dilakukan dengan adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya, setiap transaksi yang terjadi didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah, setiap transaksi yang terjadi selalu dicatat dalam buku catatan akuntansi serta catatan akuntansi dijaga untuk tetap up to date, laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan atau akuntansi sebelum didistribusikan serta adanya pemisahan tugas yang jelas dalam rangka pelaksanaan APBD dan APBN. Sistem pengendalian intern dilakukan dengan baik dalam implementasinya akan menunjukkan praktek yang baik dan berdampak bagi semakin baik auditor internal melakukan review, sehingga kualitas informasi keuangan dari laporan keuangan disajikan oleh pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah.

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Hasil pengujian terhadap tanggapan 168 responden memberikesimpulan penelitian ini antara lain; Peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila auditor internal pemerintah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku akan semakin baik. elanjutnya, sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif penerapannya menjadikan auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Implikasi teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, yang berkaitan dengan kualitas keuangan pemerintah daerah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksud diantaranya adalah peningkatan peran auditor internal yang memiliki tugas dalam hal pengawasan serta pemeriksaan serta penerapan sIstem pengendalian intern pemerintah yang baik sehingga praktik yang baik dapat diwujudkan. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga mendorong arah riset akuntansi sektor publik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku agar Kepala Daerah maupun Kepala OPD lebih memperhatikan pentingnya peningkatan peran auditor internal dengan cara memaksimalkan fungsi dan tugas auditor

internal pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap proses pelaporan keuangan pemerintah, sehingga sejak dini segala kecurangan dapat ditemui dan diperbaiki. Hal ini akan berdampak pada semakin berkualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Keterbatasan

Walaupun penelitian telah diselesaikan, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak keterbatasan antara lain;

1. Nilai adjusted R^2 relatif kecil, sehingga variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini kurang memprediksi variabel dependen kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan di Maluku secara umum.

Referensi

- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Badan Pemeriksaa Keuangan, (2021). *Bertahan Menghadapi Pandemi*, https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2022/annual__2021_1650942056.pdf
- Badan Pemeriksaa Keuangan, (2022). *Bangkit dan Tumbuh Untuk BPK yang Makin Kuat dan Makin Hebat*, https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2023/annual__2023_1678862729.pdf
- Badan Pemeriksaa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, (2023). *Zona Integritas*, <https://maluku.bpk.go.id/>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, N. A. (2016). Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar. *Journal Riset Mahasiswa (JRMx)*, xx(xx), 1–15. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1289/978>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264–275. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/32359/30699>
- Wahyuni, A., Aini, N., Isnaini, P., Sholeha, P., Putri, R. A., Permatasari, Y., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa,* 4(1), 78–87. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art9>